

Penguatan 1,5 *Track Diplomacy* guna Meredam Potensi Konflik di Perairan Laut Cina Selatan

Drs. Berlian Helmy, M.Ec.

Direktur Pengkajian Ideologi dan Politik Debidjianstrat Lemhannas RI
(Alumnus PPRA 59 Lemhannas RI)

Abstrak

Laut Cina Selatan (LCS) sudah menjadi isu utama bagi pemerintahan RI karena kaitannya dengan masalah pengamanan kedaulatan wilayah RI yang bersentuhan dengan kepentingan negara-negara yang terlibat di dalamnya. Indonesia memiliki kepentingan dalam sengketa LCS karena sebagian dari ZEE Indonesia bertentangan dengan 9 garis putus-putus Cina. Meskipun Indonesia bukan negara yang bersengketa langsung (*non-claimant states*), akan tetapi apabila tidak dikelola dengan baik, akan memicu konflik antar negara yang dapat mengancam keamanan wilayah RI. Untuk mendalami permasalahan ini, penulis akan menggunakan 1,5 *track diplomacy* sebagai cara utama untuk mengelola potensi konflik di wilayah LCS. 1,5 *track diplomacy* adalah gabungan antara *track 1 diplomacy* dan *track 2 diplomacy*. 1,5 *track diplomacy* mengedepankan *low-politics* yang dijalankan oleh negara maupun LSM dalam koordinasinya untuk menciptakan sinkronisasi dan harmonisasi untuk meredam potensi konflik resolusi secara konstruktif. Dengan demikian, teori liberalism menguatkan pembenaran bahwa LSM dan negara mempunyai peran yang luar biasa dan sangat menentukan dalam politik global bagi pengelolaan potensi konflik untuk ditransformasikan menjadi potensi kerjasama yang saling menguntungkan. 1,5 *track diplomacy* merupakan pilihan strategi yang paling tepat dalam menghasilkan konstruksi keamanan baru yang lebih konstruktif sehingga implementasinya perlu dikedepankan oleh Indonesia sebagai negara besar yang paling berpengaruh di kawasan.

Kata kunci: Laut Cina Selatan, 1,5 *track diplomacy*, Indonesia



Sumber: voa.com

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sengketa Laut Cina Selatan (LCS) sudah menjadi isu utama bagi pemerintahan RI karena kaitannya dengan masalah pengamanan kedaulatan wilayah RI yang bersentuhan dengan kepentingan negara-negara yang terlibat di dalamnya. LCS merupakan jalur komersial yang strategis bagi perdagangan yang melewati wilayah wilayah perairan RI selain potensi kekayaan sumber daya alamnya yang kaya telah menjadikan wilayah tersebut penting bagi pengembangan ekonomi di negara sekitar. Dengan besarnya potensi ekonomi wilayah LCS, telah mendorong sejumlah negara besar yang berkepentingan, terutama Cina dan AS untuk menempatkan beberapa pangkalan militernya di wilayah tersebut. Sementara wilayah tersebut juga berbatasan langsung dengan negara-negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia.

Untuk mengatur batas wilayah antar negara di wilayah perairan LCS tersebut, telah ditetapkan *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)* pada tahun 1982 yang ditandatangani oleh seluruh anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai kerangka hukum yang mengimbangi kepentingan ekonomi dan keamanan negara-negara di sekitar.¹ *UNCLOS* juga mengatur mengenai Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) negara-negara kepulauan seperti Indonesia. Dalam article 56 pada *UNCLOS*, negara-negara kepulauan memiliki yuridiksi dan hak dalam pengelolaan dan konservasi sumber daya alam yang merupakan pengelolaan produksi energi melalui tenaga air, arus dan angin.² Indonesia memiliki kepentingan dalam sengketa LCS karena sebagian dari ZEE Indonesia bertentangan dengan 9 garis putus-putus Cina. Masalah muncul ketika 9 (Sembilan) garis putus-putus milik Cina (*Chinese Nine Dashed Line/CNDL*) tumpang tindih dengan ZEE

bagian utara pulau Natuna. Bahkan CNDL menimbulkan sengketa wilayah dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya, seperti Malaysia, Vietnam, Filipina, dan Brunei Darussalam (*claimant states*). Meskipun Indonesia bukan negara yang bersengketa langsung (*non-claimant states*), akan tetapi apabila tidak dikelola dengan baik, akan memicu konflik antar negara yang dapat mengancam keamanan wilayah RI.

Untuk mendalami permasalahan ini, penulis akan menggunakan *1,5 track diplomacy* sebagai cara utama untuk mengelola potensi konflik di wilayah LCS. *1,5 track diplomacy* adalah gabungan antara *track 1 diplomacy* dan *track 2 diplomacy*. *Track 1 diplomacy* adalah saat pemerintah, pejabat pemerintah atau diplomat menjadi aktor utama dalam proses perdamaian dan diplomasi dapat dijadikan alat untuk mencapai perdamaian. Di sisi lain, *Track 2 diplomacy* adalah ketika Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan aktor non-negara (*Non-State Actor/NSA*) berperan sebagai aktor utama dalam proses perdamaian dan resolusi konflik dapat dijadikan alat untuk mencapai perdamaian.³ Melihat dari kedua *track diplomacy* tersebut, *1,5 track diplomacy* adalah saat pemerintah dan LSM bekerja sama dalam pencapaian perdamaian melalui mediasi yang diselenggarakan oleh LSM internasional, dengan cara ini sebagai alat utama dalam proses pencapaian perdamaian.⁴

Rumusan Masalah

Melihat adanya potensi sengketa wilayah di LCS, terutama antar negara *claimant states* bahwa kedua belah

pihak memiliki kepentingan yang saling bertentangan, yaitu Indonesia dengan kepentingan ZEE mereka dan Cina yang bertindak sesuai dengan 9 garis putus-putus yang sudah lama diterapkan oleh Cina. Namun semua upaya untuk menyelesaikan sengketa LCS belum membuahkan hasil positif. Oleh karena itu dalam karya ilmiah ini, penulis akan menjelaskan secara detail isu sengketa LCS dan peran Indonesia, serta bagaimana *1,5 track diplomacy* dapat mengelola setiap potensi konflik yang dapat timbul dalam isu LCS. Selain itu, dalam karya ilmiah ini, penulis akan memberi beberapa teori yang mendukung penggunaan *1,5 track diplomacy* sebagai alat utama untuk mencapai penyelesaian masalah sengketa LCS.

PEMBAHASAN

Awal mula permasalahan sengketa LCS terjadi pada tahun 1947 saat pemerintah Cina menciptakan sebuah wilayah di sekitar LCS yang berbentuk garis U yang terdiri dari 11 garis putus-putus, mencakup sebagian besar dari wilayah tersebut. Namun pada tahun 1953, Partai Komunis Cina menghilangkan 2 garis dari wilayah Cina, menghasilkan 9 garis putus-putus (CNDL) yang dipermasalahkan dalam sengketa LCS.⁵ Pada tahun 1986, Indonesia telah secara resmi bergabung dalam *UNCLOS* dan ZEE telah diterapkan pada wilayah kelautan Indonesia. Namun Cina baru bergabung kedalam *UNCLOS* pada tahun 1996, walaupun demikian Cina memiliki sejarah yang panjang dalam sengketa wilayah di sekitar LCS. Cina dan Filipina berbenturan mengenai klaim wilayah Karang Scarborough pada tahun 1997.⁶ Pada Mei



2009, Cina mengajukan klaim kepada PBB bahwa pulau-pulau seperti Spratly, Karang Scarborough dan Paracel adalah bagian dari wilayah Cina. Oleh karena itu, pada tahun 2013 Filipina mengajukan gugatan arbitrase terhadap Cina kepada Mahkamah Arbitrase Antarbangsa. Namun, Cina tetap menegaskan posisi mereka dalam kasus ini dan tidak mengikuti prosedur kasus tersebut yang disenggarakan pada The Hague, Belanda.⁷

Indonesia mulai berkonflik dengan Cina saat ada masalah penangkapan ikan secara illegal yang dilakukan oleh Cina yang memaksa Indonesia untuk lebih agresif terhadap perikanan illegal. Tetapi, tensi masalah antara Indonesia dan Cina semakin meningkat ketika Cina mengklaim bagian utara pulau Natuna sebagai bagian dari CNDL yang ada dalam kekuasaan Cina.⁸ Indonesia memiliki kepentingan nasional untuk memperjuangkan pulau Natuna sebagai bagian teritori Indonesia, tidak hanya untuk mengamankan sumber daya alam yang ada di sekitar pulau Natuna tetapi juga untuk menegaskan posisi Indonesia sebagai negara kepulauan yang kuat.⁹ Dalam administrasi Jokowi, berusaha untuk mengubah persepsi bahwa Indonesia terlalu bersekutu dengan AS ataupun Cina dan mengembangkan kemampuan nasional secara bebas dan mandiri dari pengaruh negara-negara asing. Hal ini dapat dilihat dengan cara administrasi Jokowi melawan penangkapan ikan ilegal, sejak tahun 2014, kapal-kapal asing yang tertangkap menangkap secara illegal telah disita, ditahan dan beberapa dari mereka ditenggelamkan.¹⁰

Kondisi terbaru dalam sengketa LCS saat ini adalah adanya peningkatan aksi agresif antara Cina, Filipina maupun AS, yang telah mengubah sikapnya terhadap masalah ini. AS secara umum telah memberikan jaminan kepada Filipina bahwa AS akan membantu pertahanan Filipina apabila ada penyerangan dari LCS.¹¹ Tidak hanya itu, Presiden Filipina, Duterte bahkan mengancam bahwa Filipina akan mengirimkan pasukan bersenjata apabila Cina tidak mengundurkan diri dari pulau-pulau yang dikuasai oleh Filipina di Laut Cina Selatan.¹²

Kasus sengketa LCS memiliki beberapa tantangan untuk ke depannya yang melibatkan negara-negara ASEAN, Cina, AS dan sekutunya. AS berusaha mengambil kontrol terhadap tantangan yang muncul dalam menghadapi agresivitas Cina dengan memanfaatkan keberadaan negara-negara sekutu tradisional di ASEAN secara asimetrik militer. Negara-negara lain seperti Inggris, Cina dan negara-negara ASEAN lainnya juga memperbanyak kehadiran militer mereka di LCS.¹³ Sebagai reaksi, Cina pun menempatkan beberapa aset militer seperti pangkalan militer, perluasan pulau, dan juga menentukan Zona Identifikasi Pertahanan Udara, yang sebelumnya menjadi perhatian khusus pihak AS.¹⁴

Melihat sengketa LCS yang berlanjut selama beberapa dekade ini, dapat diartikan bahwa metode penyelesaian yang dilakukan oleh *claimant states* masih belum menghasilkan penyelesaian yang baik. Negara kepulauan di sekitar LCS harus lebih tegas saat berhadapan dengan Cina. Pihak yang terlibat dalam sengketa LCS harus menggunakan *1,5 track diplomacy*

secara efektif agar masalah sengketa LCS dapat dikendalikan dengan baik. LSM internasional harus lebih banyak terlibat dalam sengketa ini, dengan menjadi mediator bagi pihak-pihak yang terlibat agar bisa mencapai suatu persetujuan yang menguntungkan untuk setiap pihak. Dengan menggunakan *1,5 track diplomacy* yang efektif dimana setiap pihak setuju untuk meningkatkan komunikasi antar satu sama lain agar suatu persetujuan dibuat untuk bisa memanjemen potensi konflik yang bisa timbul dalam LCS. Kehadiran negara-negara besar seperti AS dan Inggris dalam LCS dapat menyeimbangi kekuatan Cina dan membuat Cina lebih waspada. Namun, negara kepulauan di sekitar LCS, seperti Indonesia, tidak bisa hanya mengandalkan kehadiran AS saja, akan tetapi juga harus bisa membangun hubungan diplomatik dengan keduanya sekaligus fokus kepada kepentingan nasional mereka. Oleh karena itu, kerjasama baik yang melibatkan negara-negara dan juga LSM internasional bersama juga dengan organisasi internasional seperti PBB untuk mediasi dan berunding suatu solusi atas sengketa LCS.

Memang sudah ada upaya dari organisasi internasional untuk membantu dalam sengketa ini, seperti gugatan arbitrase kepada Mahkamah Arbitrase Antar bangsa dan membawa sengketa LCS kepada PBB. Namun organisasi internasional ini harus lebih tegas terhadap Cina yang bisa dilakukan dengan berbagai sanksi internasional berupa sanksi diplomatik, sanksi militer atau sanksi ekonomi. Negara-negara kepulauan di wilayah LCS diharapkan dapat saling berkerjasama secara multilateral atau melalui wadah ASEAN

untuk menghadapi ancaman kedaulatan mereka oleh pihak Cina.

Masalah penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan telah melalui banyak upaya internasional, termasuk PBB dan pengadilan internasional. Namun, semua upaya yang telah dilakukan selama ini belum mencapai kesepakatan untuk mengakhiri perselisihan sengketa. Dengan mengedepankan *1,5 track diplomacy*, diharapkan dapat meredam potensi konflik. Oleh karena itu, penulis memilih menggunakan teori liberalism dalam memahami dan menyelesaikan sengketa LCS. Melihat kondisi masalah ini, dimana negara-negara yang terlibat dalam sengketa LCS tidak dapat mengimbangi dan menyelesaikan masalah dengan Cina secara bilateral ataupun melalui pengadilan internasional; karena itu, kerja sama antara negara dengan organisasi non-pemerintah serta aktor non-negara harus dibuat, sesuai dengan platform *1,5 track diplomacy* yang selaras dengan teori liberalisme.

Pada dasarnya, liberalism mempercayai dua konsep dasar yaitu; pertama, masyarakat madani melengkapi segala aspek kehidupan manusia, oleh karena itu kebebasan manusia harus dipahami dalam istilah yang sesuai dengan masyarakat madani. Kedua, pemerintah atau negara harus melayani sesuai dengan masyarakat madani untuk mencapai kebebasan dan keunggulan manusia.¹⁵ Di dalam liberalism, negara bagian dan non-negara bagian adalah aktor yang penting dalam kerja sama untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu untuk kebebasan dan kesejahteraan bersama.¹⁶

1,5 track diplomacy mengedepankan *low-politics* yang dijalankan oleh negara



maupun LSM dalam koordinasinya untuk menciptakan sinkronisasi dan harmonisasi untuk meredam potensi konflik resolusi secara konstruktif. Dengan demikian, teori liberalism menguatkan pembenaran bahwa LSM dan negara mempunyai peran yang luar biasa dan sangat menentukan dalam politik global bagi pengelolaan potensi konflik untuk ditransformasikan menjadi potensi kerjasama yang saling menguntungkan. Dengan 1,5 *track diplomacy*, pejabat pemerintah seperti diplomat dapat bernegosiasi dengan satu sama lain dalam masalah sengketa LCS secara formal. Sementara secara simultan, LSM mengedepankan prioritas pembangunan ekonomi dan iptek melalui inisiasi konsorsium dan kolaborasi proyek pengembangan sumber daya di perairan LCS yang melibatkan *claimant states* dan *non-claimant states* guna menurunkan tensi tegangan dengan Cina. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat. Namun, semua ini harus melalui proses mediasi yang diatur oleh LSM internasional agar komunikasi antara pihak bisa lancar dan membuka peluang untuk negosiasi antara pihak yang terlibat. Mekanika 1,5 *track diplomacy* dalam kerangka *low-politics* yang menfokuskan pada pemanfaatan sumber daya bagi pengembangan kapasitas ekonomi dari *claimant states* maupun *non-claimant states*, dapat dijalankan dalam model informal. Dengan demikian, mekanika 1,5 *track diplomacy* memberikan akses yang menghasilkan produk proyek yang konkrit dan berdampak terhadap perubahan konstruktif arsitektur keamanan wilayah di LCS.

PENUTUP

Kesimpulan

Seperti yang diungkapkan dalam seluruh karya ilmiah ini, sengketa LCS merupakan isu yang sangat relevan tidak hanya untuk Indonesia tetapi juga untuk politik global. Awal mula sengketa LCS dimulai ketika Cina mendirikan 9 garis putus-putus yang tumpang tindih dengan negara-negara kepulauan di sekitar LCS, seperti Filipina dan Indonesia. Berulang-kali Cina melanggar peraturan *UNCLOS* yang sudah ditetapkan mengenai ZEE negara-negara kepulauan sekitarnya dan juga sengketa wilayah pulau di LCS. Filipina dan Indonesia sering mengalami konflik dengan Cina tentang masalah LCS, dimana kapal-kapal Cina sering melakukan penangkapan ikan secara ilegal. Telah dilakukan berberapa upaya untuk menghentikan dominasi Cina di LCS, seperti gugatan arbitrase terhadap Cina kepada Mahkamah Arbitrase Antar Bangsa, namun semua upaya yang dilakukan tidak berhasil. Dengan ini, menghasilkan negara-negara yang terlibat dalam sengketa ini harus bertindak lebih agresif terhadap Cina dengan meningkatkan kehadiran militer mereka dan kerjasama antar negara untuk mencegah Cina.

Dapat dibuktikan bahwa 1,5 *track diplomacy* merupakan pilihan strategi yang paling tepat dalam menghasilkan konstruksi keamanan baru yang lebih konstruktif sehingga implementasinya perlu dikedepankan oleh Indonesia sebagai negara besar yang paling berpengaruh di kawasan dengan upaya menerapkan manajemen konflik yang mampu mentransformasikan potensi konflik menjadi potensi kerjasama konstruktif antara *claimant states* dan *non-claimant states* di wilayah perairan LCS.

Saran

1. Mengembangkan pola *Workshop on Management Conflict in the South China Sea* yang diprakarsai oleh Indonesia secara berkala dan tahunan, dengan melibatkan para pakar ekonomi dan iptek dari *claimant states* dan *non-claimant states*, dengan insentif proyek pengembangan potensi SKA.
2. Mengedepankan isu keamanan maritim yang menjadi *common-interest* dan *common concern*, yang bertitik-berat pada agenda *Eradicating Trans-National Organized Crime in the South China Sea* melalui pendirian *center for law enforcement* di Indonesia atas biaya bersama (*claimant states* dan *non-claimant states*).
3. Mengadakan proyek *Mapping the Future of Society South China Sea 5.0 and Its Scenario Planning* dengan bobot konten yang mengedepankan pengembangan teknologi algoritma antara *claimant-states* dan *non-claimant states*.

DAFTAR PUSTAKA

- Connelly, A. (2017). Indonesia di Laut Cina Selatan: Berjalan sendiri. *Lowy Institute For International Policy*, 7-10. Retrieved April 7, 2019.
- Deutsche Welle. (2013, April 10). South China Sea timeline | DW | 10.04.2013. Retrieved April 6, 2019, from <https://www.dw.com/en/south-china-sea-timeline/a-16732585>
- Huang, C., & Sutter, R. (2016, December 18). South China Sea, More Tension and Challenges. Retrieved April 7, 2019, from <http://cc.pacforum.org/2016/05/south-china-sea-tension-challenges/>
- Huang, K., & Ng, T. (2018, October 01). Beijing faces growing challenges to its South China Sea claims. Retrieved April 7, 2019, from <https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/2166529/beijing-faces-growing-challenges-its-south-china-sea-claims>
- IMTD. (n.d.). *What Is Multi-Track Diplomacy?* Retrieved April 6, 2019, from <http://imtd.org/about/what-is-multi-track-diplomacy/>
- Kusumadewi, A. (2016, June 20). Perairan Natuna, 'Medan Tempur' Indonesia-China. Retrieved April 7, 2019, from <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160620170157-20-139564/perairan-natuna-medan-tempur-indonesia-china>
- Lowy Institute. (n.d.). South China Sea. Retrieved April 6, 2019, from <https://www.lowyinstitute.org/issues/south-china-sea>
- Meyer, P. K., & Nurmandi, A. (2019). Indonesia's swift securitization of



- the Natuna Islands how Jakarta countered China's claims in the South China Sea. *Asian Journal of Political Science*, 27(1). doi:DOI 10.1080/02185377.2019.1590724
- Mourdoukoutas, P. (2019, March 30). America Changes The Tone In South China Sea Disputes. Retrieved April 7, 2019, from <https://www.forbes.com/sites/panosmourdoukoutas/2019/03/30/america-changes-the-tone-in-south-china-sea-disputes/#2a81ca212c93>
- Press, T. A. (2016, July 12). Timeline: The China-Philippines South China Sea dispute. Retrieved April 6, 2019, from <https://www.apnews.com/bcd47429a69240af81544554a78fd138>
- Puspitawati, D. (2018, August 14). Defending territorial integrity over Natuna islands. Retrieved from <https://www.thejakartapost.com/academia/2018/08/14/defending-territorial-integrity-over-natuna-islands.html>
- Robertson, J. M. (1971). *The meaning of liberalism: With a foreword by the Earl of Oxford and Asquith*. Port Washington, NY: Kennikat Pr.
- Suda, Z., & Musil, J. (2000). *The meaning of liberalism: East and West*. Budapest: Central European U.P.
- United Nations Convention on the Law of the Sea 1982*. Article 56
- Westcott, B., & Lendon, B. (2019, April 05). Duterte threatens 'suicide mission' if Beijing oversteps in South China Sea. Retrieved April 7, 2019, from <https://edition.cnn.com/2019/04/05/asia/south-china-sea-duterte-beijing-intl/index.html>
- Wolleh, O. (2007). Track 1.5 Approaches to Conflict Management: Assessing Good Practice and Areas for Improvement. *Bergof Foundation for Peace Support*, 1-3. Retrieved April 7, 2019.

Endnotes

- 1 Lowy Institute. (n.d.). South China Sea. Retrieved April 6, 2019, from <https://www.lowyinstitute.org/issues/south-china-sea>
- 2 *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982*. Article 56
- 3 IMTD. (n.d.). What Is Multi-Track Diplomacy? Retrieved April 6, 2019, from <http://imtd.org/about/what-is-multi-track-diplomacy/>
- 4 Wolleh, O. (2007). Track 1.5 Approaches to Conflict Management: Assessing Good Practice and Areas for Improvement. *Bergof Foundation for Peace Support*, 1-3. Retrieved April 7, 2019.
- 5 Press, T. A. (2016, July 12). Timeline: The China-Philippines South China Sea dispute. Retrieved April 6, 2019, from <https://www.apnews.com/bcd47429a69240af81544554a78fd138>
- 6 Deutsche Welle. (2013, April 10). South China Sea timeline | DW | 10.04.2013. Retrieved April 6, 2019, from <https://www.dw.com/en/south-china-sea-timeline/a-16732585>
- 7 Puspitawati, D. (2018, August 14). Defending territorial integrity over Natuna islands. Retrieved from <https://www.thejakartapost.com/academia/2018/08/14/defending-territorial-integrity-over-natuna-islands.html>

- islands.html
- 8 Kusumadewi, A. (2016, June 20). Perairan Natuna, 'Medan Tempur' Indonesia-China. Retrieved April 7, 2019, from <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160620170157-20-139564/perairan-natuna-medan-tempur-indonesia-china>
 - 9 Meyer, P. K., & Nurmandi, A. (2019). Indonesia's swift securitization of the Natuna Islands how Jakarta countered China's claims in the South China Sea. *Asian Journal of Political Science*, 27(1).
 - 10 Connelly, A. (2017). Indonesia di Laut Cina Selatan: Berjalan sendiri. *Lowy Institute For International Policy*, 7-10. Retrieved April 7, 2019.
 - 11 Mourdoukoutas, P. (2019, March 30). America Changes The Tone In South China Sea Disputes. Retrieved April 7, 2019, from <https://www.forbes.com/sites/panosmourdoukoutas/2019/03/30/america-changes-the-tone-in-south-china-sea-disputes/#2a81ca212c93>
 - 12 Westcott, B., & Lendon, B. (2019, April 05). Duterte threatens 'suicide mission' if Beijing oversteps in South China Sea. Retrieved April 7, 2019, from <https://edition.cnn.com/2019/04/05/asia/south-china-sea-duterte-beijing-intl/index.html>
 - 13 Huang, K., & Ng, T. (2018, October 01). Beijing faces growing challenges to its South China Sea claims. Retrieved April 7, 2019, from [https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/2166529/beijing-faces-growing-challenges-its-south-china-](https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/2166529/beijing-faces-growing-challenges-its-south-china-sea-claims)
 - 14 Huang, C., & Sutter, R. (2016, December 18). South China Sea, More Tension and Challenges. Retrieved April 7, 2019, from <http://cc.pacforum.org/2016/05/south-china-sea-tension-challenges/>
 - 15 Suda, Z., & Musil, J. (2000). *The meaning of liberalism: East and West*. Budapest: Central European U.P.
 - 16 Robertson, J. M. (1971). *The meaning of liberalism: With a foreword by the Earl of Oxford and Asquith*. Port Washington, NY: Kennikat Pr.